

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat (PUSDAI) merupakan salah satu lembaga dakwah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Sebagai pusat dakwah tingkat provinsi, PUSDAI tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pusat berbagai aktivitas yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi secara terencana dan berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut memerlukan dukungan sistem administrasi yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Data DKM PUSDAI Jawa Barat, 2024).

PUSDAI Jawa Barat menyelenggarakan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan keagamaan, pendidikan Islam, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pelayanan kepada umat. Beragamnya program yang dilaksanakan menunjukkan bahwa PUSDAI tidak hanya menjalankan fungsi peribadatan, tetapi juga berperan sebagai lembaga dakwah yang berorientasi pada pengembangan kualitas kehidupan masyarakat. Pelaksanaan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya keuangan yang dikelola untuk menunjang keberlangsungan aktivitas organisasi (Munir, 2021).

Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, PUSDAI memperoleh sumber pendanaan dari berbagai pihak, seperti infak, sedekah, hibah, donasi masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program organisasi. Dana yang diterima tersebut merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan aktivitas lembaga dakwah (Fadillah, 2022).

Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan proses penerimaan dan penggunaan dana, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana dana tersebut dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui sistem pelaporan keuangan yang mampu memberikan informasi mengenai sumber penerimaan, penggunaan dana, serta kondisi keuangan organisasi secara jelas dan sistematis. Dengan adanya sistem pelaporan keuangan yang baik, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana yang mereka berikan digunakan untuk mendukung berbagai program dakwah yang dilaksanakan oleh organisasi (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018).

Pelaporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Melalui laporan keuangan, pengelola organisasi dapat menyampaikan informasi mengenai aktivitas keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan, evaluasi, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan masyarakat (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, pelaksanaan pelaporan keuangan di lingkungan DKM PUSDAI Jawa Barat telah menjadi bagian dari aktivitas administrasi organisasi. Namun demikian, sistem pelaporan keuangan yang diterapkan masih menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pelaporan, proses penyusunan laporan keuangan, serta implementasi standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba dalam aktivitas administrasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut (Hasil Observasi Awal Peneliti, 2025).

Kajian mengenai sistem pelaporan keuangan pada lembaga dakwah menjadi penting karena aktivitas organisasi yang semakin kompleks memerlukan sistem administrasi yang semakin baik. Semakin banyak program yang dilaksanakan, maka semakin besar pula kebutuhan terhadap informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut diperlukan tidak hanya oleh pengurus organisasi, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pihak yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program dakwah (Siagian, 2008).

Peta persoalan yang muncul dalam penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan lembaga dakwah terhadap sistem pelaporan keuangan yang mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi. Pada satu sisi, masyarakat mengharapkan adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana umat. Namun pada sisi lain, pelaksanaan pelaporan keuangan pada lembaga dakwah seringkali menghadapi berbagai keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sistem administrasi, maupun mekanisme pelaporan yang diterapkan (Kusnadi, 2020).

Persoalan pertama berkaitan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan lembaga dakwah. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan dana melalui infak, sedekah, maupun bentuk donasi lainnya memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan oleh organisasi. Oleh karena itu, lembaga dakwah dituntut untuk mampu menyajikan informasi keuangan yang terbuka dan mudah dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Wahyuni, 2022).

Persoalan kedua berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban bagi pengelola organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang dilakukan, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dalam konteks lembaga dakwah, akuntabilitas menjadi sangat penting karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat dan digunakan untuk

kepentingan umat. Oleh karena itu, setiap penggunaan dana harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Fadillah, 2022).

Persoalan ketiga berkaitan dengan sistem administrasi yang digunakan dalam proses pelaporan keuangan. Sistem administrasi yang baik akan menghasilkan informasi yang lebih akurat, mudah ditelusuri, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Sebaliknya, sistem administrasi yang kurang tertata berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana organisasi (Siagian, 2008).

Persoalan keempat berkaitan dengan kebutuhan terhadap standar pelaporan keuangan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan. Standar pelaporan diperlukan agar informasi yang disajikan memiliki format yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Dengan adanya standar yang jelas, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tata kelola lembaga dakwah yang baik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem pelaporan keuangan diterapkan pada DKM PUSDAI Jawa Barat sebagai salah satu lembaga dakwah yang

memiliki aktivitas organisasi yang cukup kompleks dan melibatkan pengelolaan dana dari berbagai sumber (Data DKM PUSDAI Jawa Barat, 2024).

Topik mengenai sistem pelaporan keuangan memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang keilmuan Manajemen Dakwah. Manajemen Dakwah merupakan ilmu yang mempelajari proses pengelolaan aktivitas dakwah secara sistematis melalui fungsi-fungsi manajemen agar tujuan dakwah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, Manajemen Dakwah tidak hanya membahas pelaksanaan kegiatan dakwah, tetapi juga mencakup pengelolaan berbagai sumber daya organisasi yang mendukung keberhasilan program dakwah, termasuk sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sumber daya keuangan (Munir, 2021).

Keuangan merupakan salah satu sumber daya penting dalam penyelenggaraan aktivitas dakwah. Berbagai program yang dilaksanakan oleh lembaga dakwah memerlukan dukungan pendanaan yang memadai agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen organisasi dakwah. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu organisasi dalam menjaga keberlangsungan program sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dakwah yang bersangkutan (Fadillah, 2022).

Dalam perspektif Manajemen Dakwah, pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan penggunaan dana, tetapi juga

berkaitan dengan bagaimana dana tersebut direncanakan, dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola organisasi. Oleh karena itu, sistem pelaporan keuangan memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi manajemen pada lembaga dakwah (Munir, 2021).

Pentingnya sistem pelaporan keuangan dalam organisasi dapat dianalisis melalui teori administrasi yang dikemukakan oleh Luther Gulick. Gulick menjelaskan bahwa administrasi merupakan proses yang melibatkan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Fungsi-fungsi tersebut dikenal dengan konsep POSDCORB yang terdiri atas Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Ketujuh fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan administrasi organisasi modern (Gulick & Urwick, 1937).

Dari berbagai fungsi yang dikemukakan oleh Gulick, fungsi Reporting menjadi salah satu aspek yang memiliki keterkaitan langsung dengan sistem pelaporan keuangan. Reporting merupakan kegiatan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan aktivitas organisasi kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Melalui Reporting, informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dapat diketahui oleh pimpinan organisasi maupun pihak eksternal yang membutuhkan informasi tersebut (Gulick & Urwick, 1937).

Reporting tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga mencakup proses pencatatan, pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga penyusunan laporan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi organisasi. Dengan adanya Reporting yang baik, organisasi dapat mengetahui tingkat pencapaian program yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, fungsi Reporting memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan organisasi (Gulick, 1937).

Dalam konteks lembaga dakwah, pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk implementasi fungsi Reporting. Laporan keuangan yang disusun oleh organisasi menjadi media untuk menyampaikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana kepada jamaah serta masyarakat. Melalui laporan tersebut, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana yang telah diberikan digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas dakwah yang dilaksanakan oleh organisasi. Dengan demikian, pelaporan keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga dakwah (Gulick, 1937).

Selain teori Reporting, penelitian ini juga menggunakan teori pelaporan keuangan yang dikemukakan oleh Kieso. Menurut Kieso, pelaporan keuangan merupakan proses penyediaan informasi keuangan yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam memahami kondisi keuangan organisasi dan mengambil keputusan yang tepat. Informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami agar mampu memberikan manfaat bagi para pengguna informasi tersebut (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018).

Pelaporan keuangan yang berkualitas akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi organisasi. Informasi tersebut dapat digunakan oleh pengurus untuk melakukan perencanaan dan pengendalian, sementara bagi masyarakat informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas organisasi. Oleh karena itu, kualitas pelaporan keuangan menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas tata kelola organisasi secara keseluruhan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018). Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, lembaga dakwah termasuk ke dalam kategori organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis karena tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, organisasi nirlaba memerlukan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan organisasinya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Salah satu standar yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. PSAK 45 memberikan pedoman mengenai bentuk dan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba yang

meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Melalui penerapan PSAK 45, organisasi diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih sistematis, transparan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Penerapan PSAK 45 menjadi penting karena dapat membantu organisasi dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan adanya standar tersebut, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan standar pelaporan yang jelas juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Secara umum, fenomena pelaporan keuangan pada lembaga dakwah dan masjid di Indonesia masih menunjukkan berbagai tantangan. Banyak lembaga dakwah yang telah berupaya melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, namun belum seluruhnya menerapkan sistem pelaporan yang sesuai dengan standar organisasi nirlaba. Sebagian laporan keuangan masih berfokus pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana tanpa menyajikan informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan organisasi (Sari, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap informasi keuangan yang transparan dengan praktik pelaporan yang masih dilakukan secara sederhana oleh

sebagian lembaga dakwah. Padahal, perkembangan masyarakat modern menuntut adanya keterbukaan informasi yang lebih luas dalam pengelolaan organisasi publik, termasuk organisasi keagamaan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan menjadi salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan oleh lembaga dakwah pada masa sekarang (Wahyuni, 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan tidak hanya menjadi kebutuhan administratif organisasi, tetapi juga menjadi kebutuhan sosial yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Semakin baik sistem pelaporan yang diterapkan, maka semakin besar pula peluang organisasi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, kajian mengenai sistem pelaporan keuangan pada lembaga dakwah menjadi penting untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dakwah di Indonesia (Nurhayati & Hidayat, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa pelaporan keuangan pada lembaga dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan organisasi. Pelaporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi antara organisasi dengan masyarakat sebagai pihak yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program dakwah. Oleh karena itu, kualitas sistem pelaporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam

menilai kualitas tata kelola lembaga dakwah secara keseluruhan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018).

Dalam perkembangannya, penelitian mengenai pelaporan keuangan pada masjid dan lembaga dakwah telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai fokus kajian. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sebagian lainnya mengkaji penerapan standar akuntansi organisasi nirlaba, sistem informasi akuntansi, maupun pengendalian internal dalam pengelolaan dana lembaga keagamaan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keuangan merupakan salah satu aspek yang mendapatkan perhatian penting dalam pengembangan tata kelola organisasi keagamaan (Akhreza, 2020).

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji sistem pelaporan keuangan lembaga dakwah melalui perspektif fungsi Reporting dalam teori administrasi Luther Gulick masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada hasil pelaporan keuangan atau tingkat akuntabilitas organisasi, sedangkan kajian mengenai bagaimana fungsi Reporting dijalankan sebagai bagian dari sistem administrasi organisasi belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang dapat dikembangkan untuk memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan pelaporan keuangan pada lembaga dakwah (Alfaridzy, 2022).

Selain itu, penelitian yang mengkaji sistem pelaporan keuangan lembaga dakwah dengan menghubungkan fungsi Reporting dan standar

PSAK 45 juga masih relatif sedikit ditemukan. Padahal, kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik. Reporting berfungsi sebagai mekanisme penyampaian informasi dan pertanggungjawaban organisasi, sedangkan PSAK 45 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba. Oleh karena itu, kajian yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut menjadi penting untuk dilakukan (Fidyawati, 2023).

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Manajemen Dakwah, khususnya pada kajian administrasi dan pelaporan keuangan lembaga dakwah. Selama ini, kajian Manajemen Dakwah lebih banyak berfokus pada aspek pengelolaan program, sumber daya manusia, dan strategi dakwah. Sementara itu, kajian mengenai sistem pelaporan keuangan sebagai bagian dari administrasi organisasi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Manajemen Dakwah, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan lembaga dakwah (Munir, 2021).

Selain memberikan kontribusi akademik, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi pengelola lembaga dakwah. Melalui penelitian ini, pengurus DKM PUSDAI Jawa Barat dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan sistem Reporting dalam manajemen pelaporan keuangan yang selama ini diterapkan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas sistem

pelaporan keuangan sehingga mampu memberikan informasi yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun masyarakat (Fadillah, 2022).

Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi masyarakat sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan lembaga dakwah. Sistem pelaporan keuangan yang baik akan membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan dana umat sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga dakwah. Kepercayaan tersebut merupakan modal penting bagi keberlangsungan berbagai program dakwah yang dilaksanakan oleh organisasi karena sebagian besar aktivitas lembaga dakwah bergantung pada partisipasi dan dukungan masyarakat (Wahyuni, 2022).

Dari perspektif kelembagaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga dakwah lainnya dalam mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang lebih baik. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan dan mekanisme pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi yang baik. Dengan demikian, manfaat penelitian ini tidak hanya dirasakan oleh DKM PUSDAI Jawa Barat, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan lembaga dakwah secara lebih luas (Nurhayati & Hidayat, 2022). Pentingnya penelitian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat budaya akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga dakwah. Sebagai organisasi yang

mengelola dana umat, lembaga dakwah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sistem pelaporan keuangan yang baik merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pengelolaan organisasi yang amanah dan profesional (Muslim, 2004).

Berdasarkan uraian fenomena, peta persoalan, keterkaitan dengan bidang keilmuan Manajemen Dakwah, serta pentingnya penguatan sistem pelaporan keuangan pada lembaga dakwah, maka penelitian ini dipandang perlu untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menganalisis sistem Reporting dalam manajemen pelaporan keuangan, implementasi standar PSAK 45 dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, serta hasil pelaksanaan sistem pelaporan keuangan pada Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pelaporan keuangan sebagai bagian dari tata kelola lembaga dakwah yang transparan, akuntabel, dan profesional (Gulick & Urwick, 1937).

Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pelaporan Keuangan Lembaga Dakwah dalam Standar PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45) (Studi Kasus di Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat)”. Judul tersebut dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang diarahkan untuk memahami sistem pelaporan keuangan lembaga dakwah

melalui perspektif fungsi Reporting dalam teori administrasi Luther Gulick serta implementasinya berdasarkan standar PSAK 45 pada DKM PUSDAI Jawa Barat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan dan mengacu pada teori Luther Gulick (POSDCORB), penelitian ini difokuskan pada fungsi *Reporting* dalam sistem pelaporan keuangan lembaga dakwah. Fokus tersebut dikaitkan dengan standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba PSAK 45. Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada pelaksanaan fungsi *Reporting* dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat serta tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 45, maka fokus penelitian ini akan mengacu pada format penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *Reporting* (pelaporan) dalam manajemen pelaporan keuangan di Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat?
2. Bagaimana implementasi standar pelaporan keuangan PSAK 45 dalam pelaksanaan fungsi *Reporting* pada manajemen pelaporan keuangan Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat?
3. Bagaimana hasil pelaksanaan manajemen pelaporan keuangan berbasis PSAK 45 berdasarkan analisis fungsi *Reporting* pada Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan fungsi *Reporting* dalam manajemen pelaporan keuangan di Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui implementasi standar pelaporan keuangan PSAK 45 dalam pelaksanaan fungsi *Reporting* pada manajemen pelaporan keuangan Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis hasil pelaksanaan manajemen pelaporan keuangan berbasis PSAK 45 berdasarkan fungsi *Reporting* di Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen dakwah, terutama yang berkaitan dengan manajemen pelaporan keuangan lembaga dakwah berbasis standar PSAK 45. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai penerapan teori reporting dari POSDCORB dalam konteks pengelolaan keuangan masjid sebagai lembaga nirlaba. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya

yang relevan, khususnya dalam kajian pelaporan keuangan lembaga keagamaan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas manajemen pelaporan keuangan agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar PSAK 45. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengurus masjid lain dalam mengelola dan melaporkan keuangan secara lebih profesional. Bagi lembaga pendidikan atau universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan lembaga dakwah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoritis

a. Reporting

Landasan teoritis dalam penelitian ini menggunakan teori reporting Luther Gulick yang diambil dari tujuh fungsi utama administrasi yang dikenal dengan POSDCORB, meliputi *Planning*, *Organizing*, *Staffing*, *Directing*, *Coordinating*, *Reporting*, dan *Budgeting* (Gulick, 1937). Teori ini digunakan untuk menganalisis tata kelola dan pelaporan keuangan di Dewan Kemakmuran Masjid

Pusat Dakwah Islam Jawa Barat dalam perspektif PSAK 45. *Reporting* merupakan salah satu fungsi utama dalam teori administrasi POSDCORB, yang merujuk pada aktivitas penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Fungsi *reporting* mencakup proses pencatatan, penyusunan, dan penyampaian laporan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya organisasi (Gulick & Urwick, 1937).

Gulick menjelaskan bahwa *reporting* berfungsi untuk memastikan adanya arus informasi yang jelas dan berkelanjutan dari pelaksana kegiatan kepada pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya. Melalui fungsi ini, pimpinan organisasi dapat mengetahui sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan, bagaimana penggunaan anggaran, serta apakah tujuan organisasi telah tercapai sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan (Gulick, 1937).

Dalam konteks organisasi nirlaba, fungsi reporting memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan internal organisasi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau pihak pemberi dana. Oleh karena itu, laporan yang disusun harus akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan, sehingga mampu

mencerminkan kinerja organisasi secara menyeluruh serta mendukung pengambilan keputusan manajerial (Gulick & Urwick, 1937).

Dalam penelitian ini, fungsi *reporting* dalam teori POSDCORB digunakan untuk menganalisis sistem pelaporan keuangan Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, khususnya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 45. Fungsi reporting dipandang sebagai jembatan antara praktik pengelolaan keuangan dan kewajiban pertanggungjawaban pengurus masjid kepada jamaah dan pihak terkait lainnya.

b. PSAK 45

PSAK 45 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang pelaporan keuangan pada lembaga nirlaba, termasuk lembaga dakwah seperti masjid, yayasan, dan organisasi sosial lainnya. PSAK 45 memberikan pedoman mengenai bentuk dan unsur laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pada organisasi nirlaba (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). PSAK 45 mengatur cara penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan, baik itu donatur, pengurus,

maupun masyarakat. Tujuan utama dari PSAK 45 adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga nirlaba dapat dicatat dengan baik, dikelola dengan efisien, dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

PSAK 45 menetapkan bahwa laporan keuangan untuk lembaga nirlaba harus mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan keuangan lembaga secara menyeluruh, mulai dari sumber dana, alokasi pengeluaran, hingga dampak sosial yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut (Kusnadi, 2020). PSAK 45 juga menekankan pentingnya pelaporan yang jelas tentang sumber-sumber pendapatan yang diterima, seperti sumbangan, zakat, dan infaq, serta bagaimana dana tersebut digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai manajemen pelaporan keuangan lembaga dakwah yang ditinjau berdasarkan standar PSAK 45 di Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana sistem pelaporan keuangan dijalankan oleh pengelola masjid serta kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku bagi entitas nirlaba. Kerangka konseptual ini disusun untuk memberikan

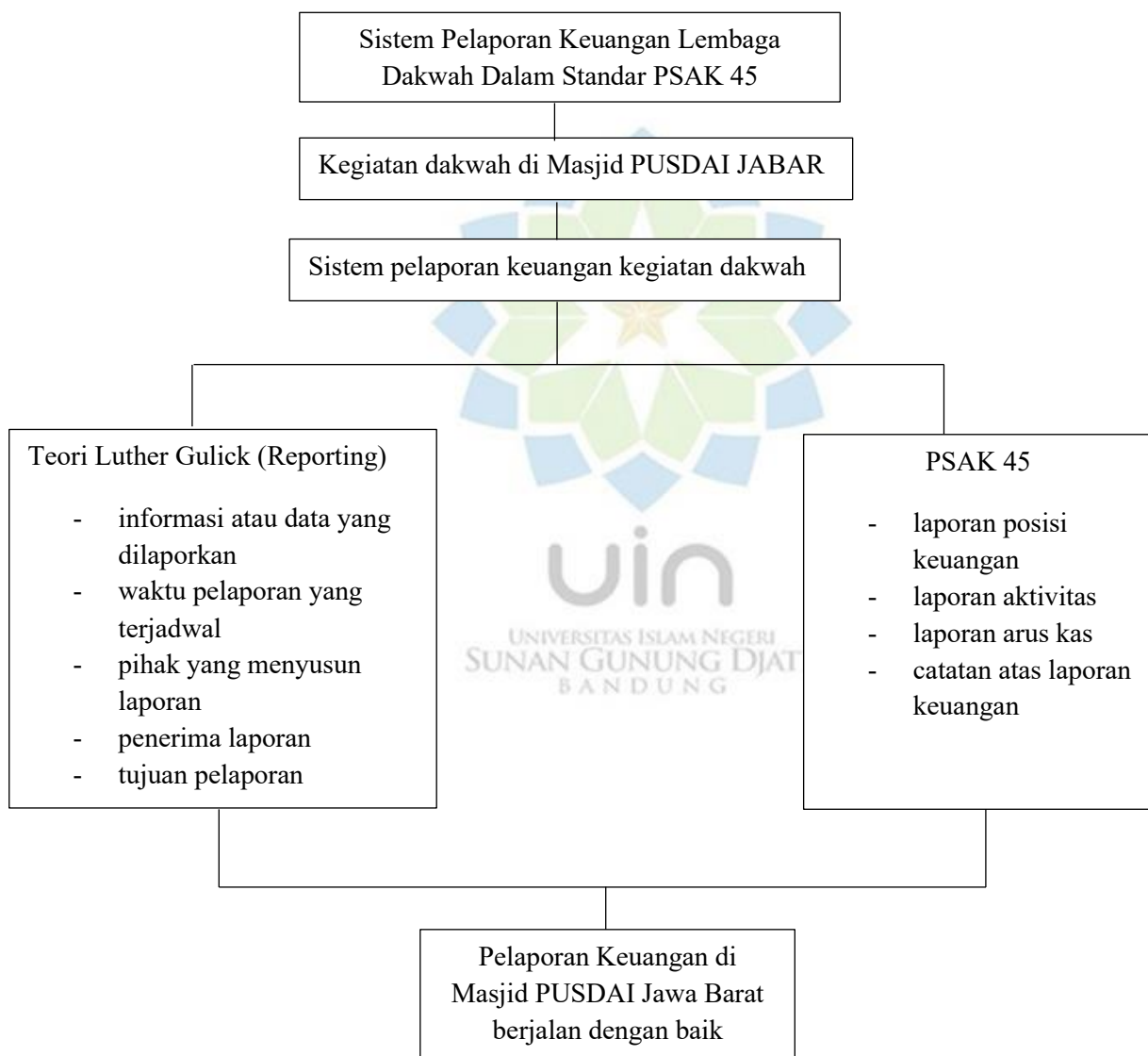
gambaran yang sistematis agar mempermudah pembaca dalam memahami alur dan fokus penelitian.

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep reporting dalam fungsi administrasi yang dikemukakan oleh Luther Gulick melalui POSDCORB, di mana pelaporan merupakan proses penyampaian informasi kegiatan organisasi kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan (Gulick & Urwick, 1937: 13). Dalam pelaksanaannya, reporting memiliki beberapa komponen penting, yaitu informasi atau data yang dilaporkan, waktu pelaporan yang terjadwal, pihak yang menyusun laporan, penerima laporan, serta tujuan pelaporan seperti evaluasi dan pengendalian, yang secara keseluruhan mendukung efektivitas manajemen organisasi (Siagian, 2008: 30).

Sementara itu, PSAK 45 digunakan sebagai landasan normatif dalam menilai kesesuaian sistem pelaporan keuangan yang diterapkan. PSAK 45 mengatur bahwa laporan keuangan entitas nirlaba harus disusun secara sistematis melalui beberapa komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, guna memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (IAI, 2011).

Dengan demikian, kerangka konseptual dalam penelitian ini menghubungkan antara konsep reporting sebagai fungsi manajemen beserta komponennya dengan PSAK 45 sebagai standar pelaporan

keuangan, yang kemudian dianalisis penerapannya pada sistem pelaporan keuangan di Masjid. Hubungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori dan standar yang berlaku.



Tabel 1.1 Kerangka Konseptual

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat (PUSDAI) yang beralamat di Jl. Diponegoro No.63, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115. PUSDAI Jawa Barat merupakan salah satu pusat dakwah Islam terbesar di Jawa Barat yang berfungsi sebagai sarana ibadah, pendidikan, sosial, dan pengembangan dakwah Islam. Selain menyelenggarakan kegiatan keagamaan, PUSDAI juga aktif melaksanakan berbagai program pembinaan umat, kajian keislaman, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pengelolaan dana umat yang berasal dari infak, sedekah, zakat, dan sumber lainnya.

Lokasi penelitian dipilih di PUSDAI Jawa Barat karena lembaga ini memiliki peran yang strategis sebagai pusat dakwah dan pengembangan syiar Islam di tingkat provinsi. Sebagai lembaga dakwah yang berada di bawah pengelolaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), PUSDAI Jawa Barat memiliki struktur organisasi yang jelas serta sistem pengelolaan keuangan yang melibatkan berbagai aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana umat. Kondisi tersebut menjadikan PUSDAI Jawa Barat sebagai objek penelitian yang relevan untuk mengkaji sistem pelaporan keuangan lembaga dakwah berdasarkan standar akuntansi yang berlaku bagi organisasi nirlaba.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sistem pelaporan keuangan yang diterapkan oleh DKM PUSDAI Jawa Barat, khususnya dalam aspek pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kesesuaian sistem pelaporan keuangan yang diterapkan dengan ketentuan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan memilih PUSDAI Jawa Barat sebagai lokasi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi standar akuntansi dalam pengelolaan keuangan lembaga dakwah, sekaligus mengidentifikasi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat yang dilakukan oleh pengurus masjid. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi bagi DKM PUSDAI Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas sistem pelaporan keuangan agar lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivistik. Paradigma konstruktivistik adalah paradigma yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi individu atau kelompok melalui pengalaman, interaksi, dan pemaknaan terhadap lingkungan sosialnya. Paradigma ini menekankan bahwa realitas tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan bersifat majemuk serta dibentuk oleh konteks sosial dan budaya tempat individu berada

(Creswell, 2014). Paradigma konstruktivistik dipilih karena paradigma ini berorientasi pada upaya memahami realitas sosial sebagai sesuatu yang dibangun melalui pengalaman, pemahaman, dan interpretasi subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, paradigma konstruktivistik memandang praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan di Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh persepsi, pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai yang dianut oleh pengurus masjid. Melalui paradigma konstruktivistik, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk melihat kesesuaian pelaporan keuangan dengan ketentuan PSAK 45 secara normatif, tetapi juga untuk memahami bagaimana pengurus DKM memaknai, menerapkan, dan menafsirkan standar pelaporan keuangan tersebut dalam praktik sehari-hari. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses, pertimbangan, serta kendala yang dihadapi pengurus masjid dalam menyusun laporan keuangan. Dengan menggunakan paradigma konstruktivistik, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem pelaporan keuangan lembaga dakwah di Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, serta menjelaskan kesenjangan antara standar PSAK 45 dan praktik pelaporan keuangan yang diterapkan, berdasarkan sudut pandang dan pengalaman para pengurus masjid sebagai pelaku utama pengelolaan keuangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, dan perspektif subjek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai praktik manajemen dan sistem pelaporan keuangan di lembaga dakwah, khususnya di Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, dalam perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif bagaimana pelaporan keuangan dipraktikkan, dimaknai, dan dijalankan oleh pengurus masjid dalam konteks organisasi keagamaan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, serta pemaknaan para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat terhadap penerapan PSAK 45 dalam pelaporan keuangan. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang mempengaruhi pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan masjid, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai sistem pelaporan keuangan lembaga dakwah.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena atau kasus secara mendalam dan komprehensif dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai karakteristik, proses, dan dinamika yang terjadi pada suatu objek atau unit penelitian tertentu (Creswell, 2014). Metode studi kasus dipilih karena dianggap tepat untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif sistem pelaporan keuangan yang diterapkan di Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam sebagai lembaga dakwah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara rinci praktik pelaporan keuangan yang berlangsung dalam konteks nyata organisasi masjid, termasuk proses, mekanisme, serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Melalui metode studi kasus, penelitian ini berfokus pada penggalian data mengenai bagaimana pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat mengelola dan melaporkan keuangan masjid, serta sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 dalam sistem pelaporan keuangan tersebut. Metode ini juga memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga peneliti dapat mengungkap kendala dan tantangan yang dihadapi, serta upaya dan solusi yang dilakukan pengurus masjid dalam menerapkan pelaporan keuangan yang

transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual mengenai sistem pelaporan keuangan lembaga dakwah di Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian pelaporan keuangan masjid dengan standar PSAK 45.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan saya adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata, narasi, atau dokumen, bukan dalam bentuk angka. Data ini digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pandangan dan pengalaman subjek penelitian (Creswell, 2014). Peneliti memilih data kualitatif karena data yang dikumpulkan berfokus pada pengungkapan secara mendalam mengenai sistem pelaporan keuangan yang diterapkan di Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat sebagai satu kasus yang diteliti dalam konteks nyata. Data kualitatif digunakan untuk memahami proses, mekanisme, serta praktik pelaporan keuangan yang berlangsung, termasuk peran pengurus, alur pencatatan, dan penyajian laporan keuangan dalam perspektif PSAK 45. Data kualitatif dalam penelitian ini berbentuk deskripsi, informasi verbal, dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan masjid. Data

tersebut tidak diukur secara numerik, melainkan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik dan dinamika sistem pelaporan keuangan pada objek penelitian. Dengan menggunakan data kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi sistem pelaporan keuangan Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat secara utuh dan kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian studi kasus.

Sumber data yang saya gunakan adalah data primer dan sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari narasumber (Sugiyono, 2021). Peneliti menggunakan teknik wawancara yang dikumpulkan di masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat terkait laporan keuangan masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat dalam perspektif PSAK 45.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, artikel ilmiah, literatur terkait sistem laporan keuangan ditinjau oleh PSAK 45.

5. Penentuan Informan

a. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus DKM Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, yang dipilih karena mereka memiliki peran kunci dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan

masjid. Pengurus DKM, seperti ketua, bendahara, dan anggota lainnya, terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan dana, serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran masjid. Oleh karena itu, mereka adalah sumber informasi yang paling relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pelaporan keuangan yang dijalankan oleh masjid.

b. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode snowball, yaitu teknik yang melibatkan penunjukan informan secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya (Creswell, 2014). Teknik ini dianggap sesuai karena fokus penelitian adalah menggali sistem pelaporan keuangan di Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat dalam perspektif PSAK 45, sehingga diperlukan informan-informan yang relevan dan memiliki pengetahuan langsung tentang proses tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data mengenai perilaku, aktivitas, dan proses yang terjadi di lapangan secara nyata (Sugiyono, 2021). Observasi

dilakukan untuk mengamati langsung praktik pelaporan keuangan yang diterapkan di masjid. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati proses-proses operasional yang terjadi, seperti bagaimana transaksi keuangan dicatat, bagaimana pengelolaan dana dilakukan, serta bagaimana laporan keuangan disusun dan disampaikan kepada jamaah. Observasi juga memberi wawasan tentang kondisi lapangan yang mungkin tidak dapat terungkap melalui wawancara saja, seperti pola komunikasi antara pengurus masjid dan jamaah, atau cara pengurus menangani masalah keuangan secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pengurus DKM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan masjid, seperti ketua, bendahara, dan anggota lainnya. Wawancara mendalam memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menggali pemahaman, pandangan, dan pengalaman pengurus mengenai pelaporan keuangan masjid, serta untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai kendala yang dihadapi dalam menerapkan PSAK 45.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa

arsip, laporan tertulis, catatan resmi, maupun dokumen lain yang relevan sebagai sumber data penelitian (Creswell, 2014).

Dokumentasi digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid, seperti laporan keuangan tahunan, catatan transaksi, bukti penerimaan dan pengeluaran, serta dokumen lainnya yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta untuk mengidentifikasi kebijakan atau prosedur akuntansi yang berlaku di masjid.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik yang menggabungkan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, atau perspektif analisis untuk memastikan keakuratan, validitas, dan kredibilitas data (Creswell, 2014). Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini juga bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari pengurus DKM, bendahara, dan dokumen keuangan Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, sehingga data yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada satu sumber atau satu teknik pengumpulan data saja. Dengan demikian, triangulasi memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai sistem

pelaporan keuangan lembaga dakwah serta tingkat penerapan PSAK 45 secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

8. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, seleksi, dan pengorganisasian data yang diperoleh selama penelitian untuk memudahkan analisis lebih lanjut (Creswell, 2014). Dalam penelitian tentang sistem pelaporan keuangan Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat dalam perspektif PSAK 45, reduksi data dilakukan dengan fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian atau Display Data

Penyajian atau display data adalah proses menata data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih terorganisir dan sistematis sehingga mudah dipahami, dianalisis, dan digunakan untuk menarik kesimpulan (Creswell, 2014). Dalam penelitian tentang sistem pelaporan keuangan Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat dalam perspektif PSAK 45, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam format yang membantu peneliti memahami hubungan antar data.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dari analisis data dalam penelitian (Creswell, 2014). Tahap ini bertujuan untuk merumuskan hasil penelitian berdasarkan temuan di lapangan yang telah melalui proses reduksi dan penyajian data. Dalam konteks penelitian ini, penarikan kesimpulan difokuskan pada sejauh mana sistem pelaporan keuangan Dewan Kemakmuran Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK 45.

9. Lokasi dan Rencana Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 63, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115. Lokasi penelitian dipilih di Masjid PUSDAI Jawa Barat karena masjid ini merupakan salah satu pusat kegiatan dakwah Islam terbesar di Jawa Barat yang memiliki sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang terstruktur. Selain itu, Masjid PUSDAI Jawa Barat secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang memerlukan pengelolaan keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kondisi tersebut menjadikan Masjid PUSDAI Jawa Barat sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 dalam sistem pelaporan keuangan lembaga dakwah.

Pemilihan lokasi penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara langsung melalui observasi terhadap proses pengelolaan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pengurus DKM Masjid PUSDAI Jawa Barat. Selain itu, peneliti dapat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, seperti ketua DKM, bendahara, staf administrasi, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan sistem pelaporan keuangan masjid. Peneliti juga dapat mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti laporan keuangan, bukti transaksi, arsip administrasi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian guna menunjang kelengkapan dan keabsahan data penelitian.

Rencana jadwal penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan yang terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama dimulai dengan persiapan penelitian yang meliputi penyusunan instrumen penelitian, pengurusan perizinan, dan koordinasi dengan pihak DKM Masjid PUSDAI Jawa Barat. Tahap kedua dilakukan melalui studi pendahuluan dan pengumpulan data awal dengan observasi lapangan serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan masjid. Tahap ketiga merupakan pelaksanaan wawancara mendalam dengan informan penelitian untuk memperoleh data yang

lebih komprehensif mengenai sistem pelaporan keuangan yang diterapkan. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan hasil penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing, serta revisi laporan penelitian hingga diperoleh hasil akhir yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jadwal penelitian ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan serta ketersediaan waktu dari pihak DKM Masjid PUSDAI Jawa Barat.

